

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI.

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan, rekomendasi dan implikasi dari temuan dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang telah dituangkan pada Bab IV.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, tampak dari pemikiran nasionalisme dan aktivitas Natsir dalam berbangsa dan bernegara dapat dijadikan salah satu rujukan dalam mengembangkan Indonesia madani. Selain itu terdapat nilai-nilai yang dapat dikembangkan sebagai sumbangsih terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai yang terdapat pada diri Natsir sebagai politikus yang moralis sangat perlu disajikan dalam proses pendidikan terutama dalam Pendidikan Kewarganegaraan hal itu penting berkaitan dengan proses pendidikan pembentukan karakter bangsa. Sebagai politikus yang moralis, Natsir layak mendapat julukan negarawan. Sebagai seorang negarawan, Natsir tidak semata-mata mengejar kekuasaan, dan kekayaan tapi selama hidupnya dia baktikan untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Natsir dalam berbangsa dan bernegara, meskipun dia pemimpin Partai Masyumi yang mempunyai platform ingin menegakan syariat Islam di Indonesia, Natsir tidak setuju dengan cara-cara yang radikal yang tidak sejalan dengan konstitusi dan demokrasi. Dalam memperjuangkan tujuan tersebut Natsir menggunakan cara-cara yang lazim dalam berdemokrasi.

Nilai-nilai yang ada pada diri Natsir yang perlu dikembangkan terhadap PKn antara lain mencintai dan mempertahankan NKRI, toleransi, jujur, kritis, akrab dengan lawan politik, tidak membeda-bedakan manusia, dan sederhana dalam keduniawian tapi kaya dalam pemikiran.

Menurut Natsir, negara adalah suatu institusi yang dibentuk untuk merealisasikan undang-undang ilahi, mengenai sebutan kepala negara menurut Natsir tidak diatur secara spesifik. Kepala negara dapat disebut khalifah, amiril mukminin, atau presiden.

- a. Latar belakang pemikiran Natsir, *pertama* Natsir dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya lahir, tumbuh dan berkembang. Natsir lahir dari kelompok santri modernis. Di tempat tersebut banyak melahirkan tokoh-tokoh pergerakan, oleh sebab itu sejak kecil Natsir sudah mengenal adanya pergerakan.. Latar belakang *kedua*, ialah pendidikan Natsir. Pendidikan formal yang ditempuh Natsir, HIS Adabiyah Padang, HIS Solok, MULO di Padang dan AMS di Bandung. Pendidikan informal mengikuti kursus agama Islam kepada A. Hassan dari Persatuan Islam (PERSIS). Latar belakang *ketiga*, ialah pengalaman berorganisasi. Organisasi yang dimasuki Natsir ialah *National Islamische Padvindrij* (Natipij), *Jong Islamiten Bond* (JIB), Persatuan Islam (Persis), Masumi, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Latar belakang *keempat*, ialah bacaan dari berbagai bahasa yang dikuasainya seperti Bahasa Belanda, Inggris, Arab, dan Latin. Latar belakang *kelima*, adalah agama yang dianutnya yaitu Islam. Ajaran Islam dijadikan sumber inspirasi utama dalam kehidupan pribadi maupun dalam berbangsa dan bernegara. Latar belakang *keenam*, adalah jabatannya sebagai Ketua Partai Masyumi, *ketujuh*, ialah pengalaman Natsir sebagai pejabat negara. Natsir pernah menjadi Menteri penerangan dan Perdana Menteri.
- b. Menurut Natsir, nasionalisme muncul karena semangat yang diterbitkan oleh masa lalu dan masa sekarang, masa lalu merupakan kenang-kenangan, sedangkan masa sekarang adalah cita-cita hidup bersama. Nasionalisme Natsir ialah nasionalisme religius islami yang mencita-citakan terbentuknya Indonesia yang Islami atau Islam yang mengindonesia. Kehidupan bernegara yang diwarnai prinsip-prinsip Islam yang universal, Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.. Natsir pun berkeyakinan bahwa mencintai negeri sendiri merupakan bagian dari ibadah. Kecintaan kepada Islam dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu kesatuan, tidak ada dikotomi antara keduanya. Sebagai rasa cintanya terhadap negara dan bangsa Indonesia, Natsir pada awal kemerdekaan menawarkan kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia Islam sebagai dasar negara. Ketika mayoritas rakyat Indonesia tidak menerima Islam sebagai dasar negara Natsir pun menerima keputusan tersebut.
- Dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dilakukan secara demokratis dan konstitusional. Konsep Natsir dalam berdemokrasi ialah *theistic democrasi*, yakni demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Natsir seorang yang anti komunis dan

menentang sekulerisme, sedangkan politik luar negeri yang dikembangkan Natsir ialah politik non blok. Negara yang berdasarkan Islam bukan negara teokrasi.

- c. Cara Natsir melakukan sosialisasi pemikiran nasionalisme, ialah dengan menulis, ceramah, dialog, dengan berorganisasi, mengajar, dan masuk pada sistem pemerintahan. Dalam menulis artikel dalam majalah Natsir kadang-kadang menggunakan nama samaran seperti Is, Mukhlis dan A.M. Cara kedua yang ditempuh Natsir dalam mensosialisasikan pemikirannya adalah melalui dialog, Natsir pernah berdialog dan berpolemik dengan Soekarno tentang Islam dan kebangsaan.

Cara lain yang ditempuh Natsir dalam mensosialisasikan pemikiran-pemikirannya, ialah dengan memasuki dan menjadi anggota organisasi, seperti *National Islamiche Padvindij (Natipij)*, *Jong Islamiten Bond (JIB)*, Persatuan Islam (Persis), Masyumi, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), sedangkan organisasi internasional antara lain, ialah *World Muslim Congres*, *Worl Muslim League*, *Majelis a'la Al Islam*, *The Islamic Charitable Foundation*, dan *The Oxpord Centre for Islamic Studies*.

Cara Natsir mensosialisasikan pemikiran-pemikirannya yang lain, ialah dengan mengajar, setelah keluar dari AMS Natsir mengajar di madrasah. dan pernah menjadi ketua Pendidikan Islam Bandung

Cara lain dalam mensosialisasikan pemikiran Natsir pun masuk pada sistem pemerintahan seperti Badan Komite Indonesia Nasional Pusat, Menteri Penerangan, anggota Parlemen, dan Perdana Menteri. Di Parlemen pada tanggal 3 April 1950, Natsir pada sidang Parlemen Indonesia Serikat mengajukan mosi integral.

- d. Implikasi yang terkandung dari pemikiran dan aktivitas Natsir dalam berbangsa dan bernegara yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan antara lain yaitu :
- 1) Perlunya memelihara dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal itu penting untuk diketahui bahwa terbentuknya NKRI salah satunya adalah hasil perjuangan Natsir di Parlemen Republik Indonesia Serikat yang terkenal dengan istilah Mosi Integral Natsir.
 - 2) Pentingnya kejujuran (*integrity*) sebagaimana perilaku Natsir dalam berbangsa dan bernegara yang selalu berpegang teguh pada prinsip yang ia yakini benar. Natsir

terkenal sebagai politikus moralis, yang menjunjung tinggi akhlakulkarimah baik dalam berpolitik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Natsir seorang tokoh Masyumi yang mempunyai tujuan membentuk masyarakat Indonesia yang Islami, Natsir tidak setuju dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi
 - 4) Perlunya mengembangkan sikap toleransi dalam makna saling menghormati (*respect*). Natsir mencontohkan kekraban dengan lawan politik dan orang yang tidak seagama dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip aqidah ajaran agama yang diyakininya.
 - 5) Mensinergikan kehidupan beragama dengan kecintaan terhadap NKRI, Natsir tidak menabrakan antara Islam dan kebangsaan. Natsir berusaha mengembangkan nilai-nilai universal yang ada dalam Islam sebagai rahmatan lil a'lamin.
 - 6) Sikap zuhud (sederhana) dalam masalah keduniawian, tapi kaya dalam pemikiran dan pengetahuan.
 - 7) Tidak membedakan sikap terhadap manusia, Natsir mau menerima orang yang menghadapnya meskipun mereka yang berbeda maksud dan tujuannya dan dari berbagai kalangan.
 - 8) Kedisiplinan dalam menggunakan waktu, Natsir datang ke kantor selalu tepat waktu dan pulangpun selalu tepat.
 - 9) Rela berqurban tanpa pamrih, mau membantu pemerintah tanpa melihat siapa yang berkuasa. Natsir mau membantu mendamaikan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.
 - 10) Kritis jika melihat penyelewengan. Kekritisan Natsir nampak dengan keikutsertaan dalam Petisi Limapuluh ketika melihat Pancasila dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan.
- e. Cara mereaktualisasikan pemikiran-pemikiran Natsir, antara lain ikut mewarnai perundang-undangan yang ada di NKRI sesuai dengan prinsip-prinsip Natsir Dalam menjalankan pemerintahan tidak perlu mengikuti cara-cara yang ada di negeri lain, istilah-istilah menggunakan yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Jadilah Islam Indonesia atau Indonesia yang Islami.

Nasionalisme bidang ekonomi, perlu dikembangkan kemandirian bangsa dengan tidak mengandalkan bantuan asing yaitu memberi contoh dan mengajak warga negara agar rajin menabung. Natsir pernah mengembangkan sistem UTISE, sebagai cikal bakal berdirinya BTN. Dengan menabung, diharapkan kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi bisa terwujud. Untuk merekatualisasikan pemikiran Natsir, dapat memanfaatkan tiga jalur dakwah, yaitu mesjid, kampus perguruan tinggi dan pesantren yang dianggap strategis untuk membimbing akhlak generasi muda dan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). Selain itu juga dalam membangun negara, Islam dijadikan landasan, serta inspirasi. Selain itu untuk merekatualisasikan pemikiran dan aktivitas Natsir, jangan berhenti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar jika melihat kemungkaran atau penyimpangan. Selain itu dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang dipegang Natsir, antara lain prinsip dalam berdemokrasi tidak meninggalkan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai tercerai berai, karena terbentuknya NKRI tersebut salah satunya adalah jasa Natsir melalui mosi integral.

Dalam konteks PKn, seorang guru PKn perlu memahami dan mengaktualisasikan pemikiran dan aktivitas Natsir sehingga hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun cara-cara mengaktualisasikan pemikiran dan aktivitas Natsir dalam berbangsa dan bernegara terhadap para guru PKn, hendaknya :

- 1) Memelihara dan memberi contoh dengan sikap kecintaan terhadap NKRI seperti menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan produk dalam negeri, tidak membedakan sikap terhadap siswa yang berbeda suku bangsa atau agama, mengapresiasi hasil budaya daerah-daerah yang ada di Indonesia dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan mempersatukan bangsa Indonesia;
- 2) Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang guru tidak boleh bersikap otoriter;
- 3) Mengembangkan sikap kritis terhadap siswa, antara lain dengan cara mengapresiasi pendapat dan pertanyaan yang diutarakan siswa. Sebab salah satu tujuan PKn adalah mengembangkan sikap kritis;

- 4) Disiplin dalam menggunakan waktu dan taat azas, sehingga para siswa mencontoh kedisiplinan guru dan guru menjadi berwibawa;
- 5) Bersikap sederhana dalam masalah keduniawian, dan tidak bersikap mengejar keuntungan semata (*profit oriented*) dan menumbuhkan sikap ikhlas dalam mendidik.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Berdasarkan latar belakang pemikiran nasionalisme Natsir, diperoleh kesimpulan khusus, bahwa sikap nasionalisme tidak bersifat universal dalam artian tidak semua orang memiliki sikap tersebut. Pemikiran dan sikap nasionalisme dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat bawaan. Faktor-faktor tersebut antara lain lingkungan tempat individu tumbuh dan berkembang, pendidikan yang diperolehnya, bacaan yang dibacanya, dan pengalaman hidup yang dialaminya.
- b. Konsep nasionalisme Natsir yang religius islami yang mengadopsi pandangan Renan tentang konsep terbentuknya perasaan nasionalisme, dipadukan dengan pandangan bahwa Islam itu bukan hanya suatu sistem ritual semata tetapi sebagai sumber peradaban yang lengkap. Natsir mencita-citakan terbentuknya masyarakat Indonesia yang islami, sebagai modal dasar terbentuknya masyarakat Indonesia madani. Berdasarkan konsep Natsir tersebut, disimpulkan bahwa ketaatan seseorang terhadap ajaran agama Islam yang dianutnya secara *kaffah* tidak menghalangi tumbuhnya perasaan cinta terhadap bangsanya (nasionalis). Justru dengan ketaatan terhadap Islam yang dianutnya tersebut, dapat dijadikan inspirasi dan landasan berkreasi dalam mengembangkan Indonesia madani yang dicita-citakan.
- c. Dari cara Natsir mensosialisasikan pemikiran-pemikiran nasionalisme, yaitu yang utama adalah dengan menulis sejak dia menjadi siswa AMS. Dari cara Natsir mensosialisasikan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis dengan bahasa tulisan yang runtut dan jelas merupakan modal dasar dalam menyebarluaskan pemikiran dan hasil temuan seseorang. Meskipun pada saat sekarang kemajuan teknologi informasi sudah begitu canggih, keterampilan menulis tetap menjadi modal yang utama.

Ma'fhum mukhalafah dari kegiatan menulis, ialah pentingnya memiliki kemampuan membaca tulisan karya orang lain yang tersebar dalam berbagai media. Membaca tidak dimaknai dengan melihat deretan huruf-huruf yang ada, tapi membaca dimaknai sebagai suatu usaha untuk memahami pemikiran orang lain yang ada dalam tulisan. Dengan banyak memahami karya tulis orang lain meskipun bukan satu-satunya cara, akan menjadikan wawasan dan pencerahan menjadi luas sehingga sangat membantu dalam menulis. Dengan demikian antara membaca dan menulis, adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

- d. Implikasi dari konsepsi pemikiran nasionalisme Natsir terhadap PKN, disimpulkan bahwa NKRI adalah suatu yang sangat penting dipertahankan guna mengembangkan Indonesia madani. Selain itu bentuk demokrasi yang berasaskan musyawarah dan mufakat adalah salah satu realisasi dari *theistic democracy* yang digagas Natsir.
- e. Cara melakukan reaktualisasi pemikiran seseorang yang penting adalah mengamalkan prinsip-prinsip yang dipegang olehnya, tidak perlu membuat suatu perkumpulan yang menamakan berdasarkan tokoh yang pemikirannya akan direaktualisasi tersebut. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip seorang tokoh tersebut, diharapkan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Implikasi

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa dari pemikiran dan aktivitas Natsir dalam berbangsa dan bernegara terdapat nilai-nilai nasionalisme yang dapat dikembangkan dalam pengembangan Indonesia Madani melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai tersebut, antara lain: nasionalis, mosi integral, *theistic democracy*, toleransi, tidak membeda-bedakan manusia, sederhana dalam keduniawian tapi mewah dalam pemikiran dan kreatifitas, disiplin, amanah, berwawasan nasional, orientasi ke masa depan, tidak sekuler, anti komunis, kosmopolit, mampu bergaul dan berkawan dengan akrab dengan lawan politik walaupun orang yang agamanya beda, mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan harga diri pribadi dan kelompok.

Adanya mosi integral Natsir mengimplikasikan bahwa Natsir serius dalam mengadakan ijtihad politik untuk kepentingan negara Indonesia yang dicintainya, dalam pikiran Natsir mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia sama pentingnya dengan menjalankan syariat Islam. Natsir pada awal kemerdekaan menawarkan Islam sebagai dasar negara tapi mayoritas anggota parlemen tidak menyetujuinya, Natsir menerimanya. Mosi integral merupakan puncak ijtihad politik yang dilakukan Natsir, dengan mengajukan suatu mosi agar pemerintah pada waktu itu menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Munculnya mosi integral tersebut, mengimplikasikan bahwa Natsir sungguh-sungguh berijtihad politik untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan Indonesia sebagai negara merdeka menuju masyarakat madani.

Keberhasilan Natsir dalam mengajukan mosi integralnya, sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada sekarang peninggalan ini, merupakan jasa dari perjuangan Natsir di Parlemen Negara Indonesia Serikat bentukan kolonial. Dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan modal dasar untuk membentuk masyarakat Indonesia madani sebagai suatu negara modern. Karena itu seluruh warga negara Indonesia walaupun satu sama lain tidak saling bertemu perlu memiliki keinginan untuk terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlunya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan saja sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa para perjuangan pendiri negara ini, tetapi perlu agar tidak kehilangan modal pokok dalam mengembangkan Indonesia madani.

Salah satu upaya menanamkan perasaan nasionalisme, terutama kepada generasi muda ialah mengintensipkan dan merevitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan baik pada pendidikan formal non formal dan informal. Di antara cara merevitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan ialah menjadikan pendidikan tersebut tidak menekankan pada aspek kognitif semata, tapi lebih menekankan pada aspek-aspek lain yang menggambarkan sikap dan perilaku cinta kepada tanah air Indonesia. Mengembangkan sikap cinta tanah air, antara lain memberi contoh dengan mencintai produk dalam negeri dari pada produk luar negeri, tidak diskriminasi berdasarkan perbedaan sukubangsa, etnis, agama, partai politik, status sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Selain itu juga harus memberi contoh mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan, serta tidak menjelek-jelekan pemerintah Indonesia terutama di dunia internasional walaupun terdapat perbedaan pandangan dengan pemerintah.

Natsir merupakan seorang demokrat, dalam arti tidak memaksakan pemikiran atau usulannya untuk diterima. Demokrasi yang dikembangkan Natsir, dinamakan demokrasi teistik (*theistic democracy*). Dalam teistik demokrasi mengimplikasikan bahwa dalam berdemokrasi harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan atau agama, dimana demokrasi ini berbeda dengan demokrasi liberal sekuler yang mengedepankan suara mayoritas walaupun bertentangan dengan ajaran ilahi. Dalam demokrasi liberal dengan adigium *vock vovuly vock day* suara rakyat adalah suara Tuhan, sedangkan dalam demokarsi teistik mengedepankan musyawarah mufakat, mengedepankan *voc day voc vovuly* suara Tuhan harus menjadi suara rakyat. Menurut hemat penulis sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila merupakan implikasi spirit demokrasi teistik yakni demokrasi yang berlandaskna nila-nilai ilahiah yang tidak mengedepankan suara mayoritas dengan adigium *one man one vote*. Demokrasi yang berlandaskan spirit permusyawaratan merupakan demokrasi yang mengamalkan ajaran agama (Islam), bukan demokrasi sekuler yang bebas dari nilai-nilai agama tapi juga bukan teokrasi (*theocracy*) Dalam demokrasi teistik keputusan harus mengedepankan hasil musyawarah, dimana hasil musyawarah tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam) yang telah berurat berakar di Indonesia.

Dalam pergaulan di luar sidang parlemen, Natsir akrab dengan lawan politik. Keakraban Natsir tersebut, mengimplikasikan bahwa Natsir memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan pada masyarakat yang plural, baik plural dalam suku bangsa, agama, partai politik, etnis dll. Pada masyarakat madani, sikap toleransi merupakan suatu pondasi yang dapat mewujudkan masyarakat yang damai, tenteram, dan berkeadilan, dalam bahasa Al Qur'an adalah negara yang “ *baldatun thoyyibun wa Robbun Ghofur* “ Makna toleransi yang dikembangkan Natsir dalam beragama, tidak dimaknai sebagai suatu sinkretisme. Toleransi yang dikembangkan Natsir, adalah sikap saling menghormati (*respect*) dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencampurbaurkan ajaran agama dan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama. Dalam pemikiran Natsir, Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam (Q.S. 2 :ayat 256), untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (Q.S. 109: ayat 6). Indonesia madani yang jadi dambaan, yang mengacu pada masyarakat Madinah pada jaman Rasul. Pada masyarakat Madinah tersebut selain komunitas Bangsa Arab

yang beragama Islam, juga terdapat komunitas Yahudi yang tidak beragama Islam, mereka hidup damai dalam naungan pemerintahan Rasul kecuali terhadap mereka yang berbuat makar.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, jika tidak ditata dengan baik rentan terjadinya disintegrasi bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan sikap toleransi yaitu dengan mengembangkan menerima dan mengakui kenyataan kemajemukan sebagai suatu yang positif. Pemahaman toleransi tidak dimaknai sebagai suatu yang netral, sebagai suatu cara agar manusia menyingkir dari agama tapi suatu pandangan hidup yang berurat berakar dalam kebenaran agama.

Dalam penelitian melalui wawancara diketahui bahwa Natsir sering kedatangan tamu yang datang dari berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai tujuan. Tamu yang datang kepada Natsir selain pejabat pemerintah dan purnawirawan ABRI, banyak juga kalangan masyarakat biasa yang berasal dari berbagai daerah dengan berbagai kepentingan. Ada yang minta bantuan untuk membangun atau memperbaiki mesjid, ada yang meminta bea siswa, ada juga yang minta ongkos untuk pulang kampung karena kehabisa uang, Natsir melayani mereka dengan baik. Cara Natsir menerima mereka dengan baik, mengimplikasikan pandangan tidak membeda-bedakan manusia. Pandangan tidak membeda-bedakan manusia (*egalitarian*) merupakan pondasi untuk bertindak adil, baik adil berkenaan dengan penegakan hukum dan berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pandangan egaliter merupakan titik sentral dalam membangun masyarakat madani Indonesia.

Pribadi Natsir yang layak mendapat apresiasi, adalah kesederhanaan dalam hal keduniawian, kesederhanaan dalam keduniawian Natsir tidak bermakna *ascetic* sebagai kosa kata yang digunakan Weber yang bermakna menjauhi masalah dunia. Kesederhanaan Natsir dalam masalah keduniawian, ialah tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri. Ketika Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan, ke kantor mengenakan jas yang bertambal, sehingga teman-teman Natsir patungan uang untuk membeli jas untuk Natsir. Natsir tidak mau memanfaatkan kesempatan menjadi pejabat untuk memperkaya diri. Kenyataan tersebut diakui oleh Kahin yang menyatakan bahwa Natsir adalah seorang pribadi yang sederhana, tulus dalam berpolitik, memiliki rasa kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak pernah korupsi. Kejujuran (*integrity*) yang ada pada diri Natsir perlu diwariskan kepada anak didik, caranya ialah dengan sering menampilkan dan menyampaikan serta memberi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari bukan kejujuran yang berbentuk pencitraan.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas, Natsir dalam berbangsa dan bernegara layak disebut sebagai seorang negarawan. Ketepatan Natsir disebut negarawan karena dia tidak berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai mana diperoleh dari wawancara dan observasi dari beberapa literatur tentang Natsir, diketahui bahwa Natsir pada awal Orde Baru dikeluarkan dari penjara karena berbeda pandangan dengan Soekarno. Pemerintah Orde Baru kesulitan untuk berdamai dengan Malaysia, maka Natsir menulis memo kepada Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdurahman agar mau menerima utusan dari Indonesia, maka Tengku Abdurahman pun mengabulkan permohonan tersebut. Kedua ialah Natsir pun menulis kepada perdana Menteri Jepang Fukuda, agar Jepang membantu Indonesia dalam membangun perekonomian Indonesia. Permintaan tersebut diterima Fukuda dengan baik. Dari dua peristiwa tersebut, mempunyai implikasi, pertama Natsir tulus membantu pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Dari perbuatan Natsir membantu pemerintah tersebut, Natsir tidak meminta imbalan apa-apa bahkan kemudian hari Natsir dicekal oleh pemerintahan Orde Baru. Padahal waktu itu Natsir baru keluar dari penjara, dan partainya dibubarkan. Natsir tidak meminta posisi jabatan dalam pemerintahan atau permintaan lain atas jasanya menghubungi PM Malaysia dan Jepang tersebut. Implikasi kedua dengan diterimanya memo oleh kedua pemerintahan Malaysia dan Jepang, menandakan bahwa Natsir sangat dihormati dan didengar, serta disegani oleh kedua kepala pemerintahan tersebut.

Mengenai peranan Natsir dalam penandatanganan Petisi 50 beserta tokoh-tokoh lain, Natsir tidak bermaksud memakzulkan pemerintah dan mengganti Pancasila dengan yang lain. Tapi Natsir tidak mau Pancasila kehilangan fungsinya sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pada waktu itu terjadi monopoli penafsiran Pancasila, dan orang yang berbeda tafsirannya dianggap anti Pancasila. Sejak penandatanganan petisi 50 itu Natsir dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Kejadian di atas tersebut, mengimplikasikan bahwa Natsir memiliki pikiran kritis dan rasional serta kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Berpikir kritis, rasional dan kreatif merupakan sebagian tujuan pembelajaran PKn. Tujuan lainnya adalah berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi (Suryadi 2009: hlm. 12).

Tak diragukan lagi, bahwa dari pemikiran dan kegiatan Natsir dalam berbangsa dan bernegara terdapat hal-hal yang dapat menginspirasi dalam memecahkan berbagai persoalan negeri ini. Walaupun terdapat hal-hal yang bersifat debatable, tetapi secara fenomenologi bagaimanapun Natsir pernah mempunyai andil dalam membangun dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terutama dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu pondasi untuk membangun Indonesia Madani.

Pandangan Natsir yang tidak sekuler yakni tidak memisahkan urusan agama dan urusan kenegaraan, mengimplikasikan bahwa Islam sebagai agama tidak ada dikotomi antara urusan kehidupan agama dan kehidupan bernegara. Justru dalam beragama kita harus mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara secara seimbang. Indonesia meskipun bukan negara agama, tapi dalam konstitusi, yaitu pada UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 bahwa tercantum “ Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa”. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara tetap mengakomodir ajaran agama meskipun tidak disebutkan secara husus terhadap salah satu agama. Karena itu ajaran komunis yang atheis, tidak diperkenankan tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, Natsir termasuk warga yang kosmopolit, yakni warga yang mendunia disebabkan aktivitasnya selain di Indonesia Natsir juga aktif di organisasi yang ruang lingkungannya regional dan internasional. Sebagaimana telah di uraikan pada bab II, bahwa Natsir diangkat sebagai wakil Presiden World Moslem Congress di Karachi tahun 1967, anggota World Moslem League di Mekah. Natsir juga menjadi anggota Majelis Al-Alam, pelopor The Oxford Centre for Islamic Studies di London Inggris. Di negara Arab Natsir sangat dikenal, dihormati dan disegani. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu tujuan PKn, ialah membentuk manusia Indonesia yang kosmopolit dengan tidak melupakan bangsanya yaitu Bangsa Indonesia. Prestasi dan kedudukan Natsir di dunia internasional tersebut, disebabkan pekerjaannya yang berlandaskan keikhlasan semata bukan untuk mengejar berbagai penghormatan dari sesama manusia. Natsir sebagai mana diungkapkan Bagir Manan, sering menanamkan kepada para juniornya termasuk Bagir Manan agar bekerja dengan tanggung jawab dan jangan melihat hasilnya.

Dari berbagai prestasi dan kedudukan Natsir di dunia Internasional tersebut, kandungan nilai yang dapat diperoleh terhadap Pendidikan Kewarganegaraan ialah antara lain kita perlu bekerja dengan penuh tanggungjawab, jangan mengharapkan hasil (*material oriented*) yang

diperoleh dan jangan berambisi untuk memperoleh kedudukan, kalau mendapat kedudukan itu amanah yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kandungan lainnya, ialah perlunya bekerja dengan penuh dedikasi dan penuh semangat serta penuh keshabaran. Pentingnya keshabaran dalam perjuangan, ialah kemampuan untuk menghindari hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan dari perjuangan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, untuk menyelesaikan studi tersebut banyak rintangan baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, fisik maupun psikis. Untuk itu keshabaran yang prima dalam menempuh studi tersebut, sangat dibutuhkan. Karena berdasar kenyataan, banyak mahasiswa yang gagal bukan karena IQ nya rendah atau finansialnya yang minim, tapi disebabkan tidak memiliki modal keshabaran sebagai sarana meraih cita-cita yang ingin dicapai.

Berkenaan dengan pengembangan Indonesia Madani yang dicita-citakan, Natsir telah memberikan pondasi berupa konsep dan praktek dalam berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupann pribadinya. Landasan dalam konsep seperti NKRI, nasionalisme religius Islami, demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, anti sekuler dan anti komunis yang atheis. Adapun landasan dalam praktek berbangsa dan bernegara, Natsir bersikap demokratis tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan tapi melalui jalur yang lazim dalam berdemokrasi. Praktek lainnya ialah Natsir mampu mengembangkan sikap toleransi, meskipun dalam sidang di Parlemen merupakan lawan yang berseberangan tapi diluar sidang akrab dengan lawan politiknya tersebut. Natsir juga termasuk kosmopolit, terbukti Natsir diakui oleh dunia internasional yang dibuktikan dengan menduduki berbagai jabatan yang bersifat internasional dan mendapat gelar DR Honoris Causa dari perguruan tinggi yang berkedudukan di luar negeri. Natsir juga terkenal orang yang sederhana dalam duniawi, hal tersebut membuktikan bahwa Natsir tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. Natsir mempunyai jiwa yang merdeka, Natsir tidak segan-segan mengeluarkan pendapat dan kritiknya ketika melihat penyelewengan penguasa meskipun berisiko ditahan atau di cecal. Natsir mengekspresikan kecintaan terhadap negeri tempat dia lahir dan dibesarkan dengan amar makruf nahi mungkar, walaupun tidak disenangi penguasa. Aktivitas Natsir dalam berbangsa dan bernegara, telah menggambarkan terwujudnya spirit masyarakat madani yaitu adanya demokrasi, pluralistik, dan toleransi.

Dalam konteks PKn, implikasi yang didapat dari penelitian terhadap perjuangan Natsir dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan ialah perlunya para pakar dan praktisi PKn mengembangkan sikap nasionalisme dimana tantangannya sesuai dengan kemajuan teknologi

komunikasi menjadi sangat berat. Oleh karena itu pengembangan dan perumusan tentang nasionalisme dalam artian menanamkan kecintaan terhadap NKRI perlu disesuaikan dengan kondisi global yang disebabkan kemajuan teknologi komunikasi. Dari penelitian terhadap perjuangan Natsir, diperoleh dasar-dasar nasionalisme yang masih relevan dengan kondisi kekinian. Dasar-dasar tersebut antara lain kecintaan terhadap keutuhan NKRI, demokrasi yang tidak mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Selain itu perlu dikembangkan sikap kesederhanaan dalam keduniawian, menghindarkan sikap konsumtif terhadap barang-barang yang mewah dan tidak penting karena sikap tersebut mendorong warga negara menghalalkan segala cara untuk memperoleh materi termasuk dengan berbuat korupsi.

Implikasi lainnya dalam konteks PKn, ialah perlunya para guru mengatur waktu dengan disiplin, sehingga idigium jam karet yang dianggap biasa di masyarakat Indonesia sedikit-demi sedikit dapat ditinggalkan. Nilai lainnya yang diperoleh dari penelitian perjuangan Natsir, ialah sikap tidak membeda-bedakan manusia yang berdasarkan strata sosial dan mampu bergaul dengan orang lain yang berbeda pandangan politik dan agama yang dipegangnya. Sikap tidak membeda-bedakan dan keakraban dengan lawan politik sangat penting untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Berdasar hal tersebut para praktisi PKn perlu member contoh kongkrit dalam tindakan tidak membeda-bedakan siswa di kelas berdasarkan strata sosial dan keyakinan yang dianutnya.

Dalam masyarakat madani nilai-nilai demokrasi adalah suatu keniscayaan yang harus ditumbuhkembangkan, dengan pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan kekuatan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kekuatan negara. Asas lain dalam masyarakat madani, adalah tumbuh suburnya sikap toleransi. Sikap toleransi dimaknai sebagai suatu sikap respect terhadap perbedaan pemikiran dan keyakinan dengan tidak mengorbankan keyakinan diri dan tidak menyingkirkan manusia dari agama. Spririt lainnya dalam masyarakat madani adalah pluralistik yakni menerima kenyataan kemajemukan sebagai suatu realita yang harus disukuri sehingga tidak menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Pluralistik tidak dimaknai sebagai sinkretisme yang mencampurbaurkan suatu keyakinan, tapi sebagai suatu kesadaran bahwa perbedaan adalah suatu realita hidup yang harus dihargai.

Wallohu a'lam bish-showab

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini, maka diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada para pakar dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, seyogianya perlu melandaskan pemikiran dan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang bernilai religi islami dengan menggali potensi nasional yang ada pada para tokoh yang integritas moralnya telah teruji. Hal ini diperlukan agar Pendidikan Kewarganegaraan menjadi hidup dan kontekstual dengan kehidupan masyarakat.
2. Kepada para peneliti, pengembang dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan seyogianya mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan berpijak pada nilai-nilai agama yang sudah berkembang di masyarakat yang telah dicontohkan oleh para pendahulu. Hal ini diperlukan agar sistem Pendidikan Kewarganegaraan mampu berkembang sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa, khasanah keilmuan, dan berwawasan Indonesia serta tidak lepas dari ajaran agama.
3. Kepada para peneliti dan pengembang PKn serta para pakar teknologi komunikasi, perlu berkolaborasi untuk membuat formulasi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi untuk dapat memperkokoh NKRI.
4. Kepada para pengembang dan peneliti Pendidikan Kewarganegaraan, penulis merekomendasikan agar menyempurnakan penelitian ini terhadap pemikiran-pemikiran Natsir yang berkenaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Diharapkan dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan inspirasi dan rujukan dalam mengembangkan konten Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, dan inspirasi dalam membangun Indonesia madani sesuai dengan tuntutan masyarakat modern
5. Kepada team pengembang kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan seyogianya memasukan atau menambah porsi riwayat para tokoh nasional yang akhlak dan dedikasinya terhadap NKRI sudah teruji, dengan mengesampingkan kepentingan politik secara sesaat. Hal itu penting agar para peserta didik mengenal para tokoh

yang diharapkan dijadikan inspirasi dan mengimitasi perilaku para tokoh tersebut dalam perilaku sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Bagi praktisi guru PKn di kelas, diperlukan sikap yang kreatif dalam menyampaikan materi PKn tentang nasionalisme dengan berbagai macam metode dan model pembelajaran. Salah satu model yang dapat diadopsi dalam menanamkan perasaan nasionalisme adalah model Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia (PKKBI).
7. Kepada para guru PKn, seyogyanya banyak membaca tentang riwayat hidup para tokoh nasional yang telah berjasa terhadap kemajuan bangsa. Salah satunya ialah membaca buku-buku tentang pemikiran dan riwayat perjuangan Natsir yang telah diakui sebagai pahlawan nasional. Diharapkan dengan membaca riwayat perjuangan Natsir, menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas PKn sehingga bermanfaat bagi terbentuknya rasa nasionalisme Indonesia menuju Indonesia madani.
8. Para guru PKn sebagai praktisi di kelas seyogianya memberi contoh sikap demokratis dalam mengajar, sebab dengan sikap guru yang demokratis diharapkan para siswa kelak kemudian hari setelah dewasa akan memiliki sikap demokratis. Dengan sikap yang demokratis akan membentuk masyarakat yang kuat sehingga tumbuh perasaan cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Perilaku guru akan ditiru oleh segenap siswa, sebagaimana diungkapkan bahwa guru adalah akan digugu dan ditiru. Siswa akan mengimitasi perilaku orang-orang disekitarnya terutama perilaku guru.
9. Kepada para politisi yang berkiprah di partai politik, seyogianya banyak mempelajari riwayat-riwayat para tokoh nasional yang mempunyai integritas moral yang telah teruji secara historis. Hal ini diperlukan, agar dalam mengembangkan Indonesia Madani berpijak dan mencontoh spirit yang telah dirintis oleh para pendahulu pendiri negeri ini.
7. Kepada para politisi terutama yang mengaku penerus Natsir, seyogianya mampu meniru sikap Natsir dalam berpolitik dengan mengedepankan nilai-nilai etika dalam berdemokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang perlu dijaga dalam berdemokrasi antara lain musyawarah, sebagaimana tercantum

dalam sila keempat Pancasila. Berilah masyarakat contoh yang baik dalam berbangsa dan bernegara, sebab sebagaimana diungkapkan oleh Albert Bandura bahwa perilaku para pemimpin akan diimitasi oleh masyarakat.

8. Kepada para pimpinan partai politik, seyogianya mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di legislatif merupakan orang yang mampu bermusyawarah. Tidak setiap orang mampu bermusyawarah dalam menyampaikan aspirasi yang diwakilinya. Karena itu untuk wakil rakyat yang duduk di legislatif perlu orang yang telah selesai dengan dirinya, dan takut pada Tuhan/ taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal itu diperlukan agar dalam melaksanakan tugas menyampaikan aspirasi masyarakat benar-benar jujur dan tidak tergiur dengan iming-iming harta yang ditawarkan pada dirinya.
9. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sebaiknya tidak terjebak mempersoalkan bentuk negara, tetapi spirit Islam perlu diperjuangkan untuk mewarnai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara menyalurkan aspirasi melalui saluran demokrasi, tidak dengan memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekerasan dan teror. Sebagai Warga negara Indonesia yang baik seyogianya mengembangkan kecintaan terhadap Negara Indonesia yang dibuktikan antara lain dengan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, tidak menjelek-jelekan Indonesia di mata dunia, *right or rong my Indonesia*, mengutamakan produk dalam negeri, menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, rajin menabung, tidak konsumtif, dan mencintai rupiah dari pada uang negara lain (dollar) Kecintaan terhadap Islam dan negara Indonesia adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bekerjalah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dengan rasa tanggungjawab.
10. Kepada para anggota DPR, seyogianya dalam mengambil keputusan mengedepankan nilai-nilai musyawarah sesuai dengan tuntutan Sila ke 4 Pancasila yang dapat menghasilkan kemupakatan. Kemupakatan mesti dikedepankan berdasarkan nilai-nilai yang ada dan telah berurat berakar di masyarakat Indonesia. Hal tersebut penting, agar dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila., dan tidak menimbulkan perpecahan yang menimbulkan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kepada para peneliti tentang nilai-nilai PKn yang diperoleh dari perjuangan dan pemikiran Natsir, seyogianya meneliti lebih konprehensif dan menyeluruh guna memperoleh nilai-nilai yang dapat memperkaya khasanah PKn.

Miftahul Aliyah, 2016

AKTUALISASI PEMIKIRAN NASIONALISME DALAM PENGEMBANGAN INDONESIA MADANI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu